

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi di bidang keuangan, pengelolaan, pelaporan, dan akuntabilitas keuangan merupakan langkah krusial untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan pemerintah. Hal ini memerlukan peran dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam bidang akuntansi. Reformasi keuangan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon bertujuan untuk mengembangkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien, yang tidak hanya efisien tetapi juga transparan dan akuntabel. Dengan melibatkan masyarakat dan meningkatkan kapasitas SDM, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat memberikan keuntungan yang optimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, Peran SDM melalui penguatan kompetensi, DPMD Kabupaten Cirebon dapat mewujudkan tujuan pembangunan yang lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon memegang peranan penting dalam mengelola dana yang dialokasikan untuk pembangunan masyarakat dan desa. Namun, terdapat masalah konkret terkait Keterbatasan SDM aparatur pemerintahan daerah Yang tidak memiliki latar belakang dalam bidang akuntansi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sri Dewi Anggadini et al. (2021), kurangnya Pegawai dengan latar belakang pendidikan akuntansi mengakibatkan rendahnya pemahaman dan penguasaan aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif (RM et al., 2024). Prosentase pegawai DPMD yang tidak memiliki pendidikan formal dibidang akuntansi dari jumlah pegawai di DPMD. Data menunjukkan bahwa lebih dari 86,21% pegawai di DPMD tidak memiliki pendidikan formal dibidang akuntansi, dari total 29 pegawai yang ada.

Melihat Dampak yang ditimbulkan, sangat jelas bahwa peningkatan Kompetensi SDM di DPMD Kabupaten Cirebon adalah sebuah keharusan. Salah satu cara untuk Meningkatkan kompetensi dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan dan workshop yang berfokus pada akuntansi

publik, manajemen keuangan, serta regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (Herry et al., 2021). Selain itu, perlu adanya program monitoring yang melibatkan para ahli dibidang akuntansi dan keuangan untuk memberikan bimbingan dan pendampingan langsung kepada SDM di DPMD Kabupaten Cirebon. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip akuntansi, SDM di DPMD Kabupaten Cirebon dapat lebih efektif dalam melakukan analisis keuangan dan membuat keputusan yang lebih tepat terkait pengelolaan dana.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) juga memiliki peran strategis dalam mendukung Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam upaya pemberdayaan desa seperti Peningkatan di tingkat desa (Husna, 2022). Dengan pelatihan dan pendampingan, DPMD membantu aparatur desa untuk lebih efektif dalam melaksanakan program pemberdayaan, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Kompetensi SDM di DPMD dan di tingkat desa sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas tersebut. SDM yang terlatih dan berpengetahuan akan mampu menerapkan kebijakan secara efektif, beradaptasi dengan perubahan, serta siap menghadapi tantangan baru dalam pemberdayaan desa.

Dampak dari kurangnya kompetensi SDM Dalam menjalankan tugas, sumber Daya Manusia di DPMD telah mengakibatkan sejumlah dampak negatif yang signifikan dalam pelaksanaan program pemberdayaan desa. Sebagai contoh, dalam program pengelolaan dana desa, ketidakpahaman pegawai tentang peraturan dan prosedur pengelolaan anggaran menyebabkan banyak desa gagal menyusun laporan keuangan yang akurat (Mahmudi, 2021), dapat dilihat yaitu sekitar 30-50% laporan mengalami revisi akibat ketidakakuratan. Hal ini berakibat pada keterlambatan pencairan dana dan tidak optimalnya penggunaan anggaran untuk kebutuhan masyarakat.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yaitu sistem informasi yang mencakup berbagai jenis data terkait pembangunan daerah, keuangan daerah, serta informasi lain yang terkait dengan pemerintahan daerah. Salah satu tujuan diciptakannya aplikasi ini yaitu untuk membuat Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) menjadi lebih transparan. Dengan demikian tidak ada lagi celah untuk melakukan kecurangan atau penyelewengan, karena sistemnya dibuat lebih terbuka (BPK RI, 2021). SIPD diharapkan dapat Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Aplikasi ini dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai sarana pendukung bagi DPMD Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugasnya (Beno et al., 2022).

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon dimulai bulan Januari 2024, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan data pembangunan. Namun, Implementasi SIPD di DPMD Kabupaten Cirebon dinilai belum efektif dan efisien dalam pengoperasiannya, dikarenakan sistemnya yang masih tergolong baru, belum sempurna, masih terdapat kekurangan dalam berbagai aspek dan aplikasi yang masih dalam tahap pengembangan (Wahyuningsih, 2022). kurangnya kompetensi SDM di DPMD Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan kapasitas pegawai, hasilnya masih perlu diperbaiki. Saat ini, sekitar 50% staf DPMD telah mengikuti pelatihan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dengan rata-rata waktu pelatihan sekitar 20 jam per sesi.

Dampak langsung dari laporan keuangan terlihat dari ketidakakuratan data yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam perencanaan dan penganggaran. Misalnya, ketidakselarasan data antara SIMDA dan SIPD dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan, mengganggu akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, masalah teknis seperti kesulitan integrasi data dari sistem lama dan lambatnya respon sistem baru dalam mengolah informasi memperburuk situasi (Chinda Aqhni Adisi & Abdul Sadad, 2022). Proses transisi ini memerlukan kelancaran operasional serta keandalan laporan keuangan DPMD Kabupaten Cirebon ke depan. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan dan dukungan teknis menjadi krusial untuk memastikan kelancaran implementasi SIPD dan akurasi laporan keuangan (Karundeng et al., 2021).

Evaluasi implementasi SIPD sangat penting untuk menilai sejauh mana sistem ini dapat meningkatkan kinerja DPMD, serta dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Studi implementasi juga memungkinkan untuk mengidentifikasi hambatan dan masalah yang timbul selama proses tersebut. Implementasi, Widodo (Syahida, 2017:10) Tanpa pengetahuan dan keterampilan yang memadai, penggunaan sistem baru ini bisa menjadi tidak efektif (Dione, 2020) Pelatihan yang memadai akan mampu mengoperasikan sistem secara optimal, meminimalkan kesalahan, dan memaksimalkan (Arif & Firmansyah, 2024).

Dalam konteks ini, evaluasi juga harus memperhatikan bagaimana proses pelatihan dan peningkatan kompetensi telah dilaksanakan, serta dampaknya terhadap kinerja sistem. Misalnya, jika staf tidak cukup terlatih dalam penggunaan SIPD, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menginput data, memahami fitur sistem, dan menghasilkan laporan yang akurat. Hal ini bisa berujung pada ketidakakuratan informasi, yang pada gilirannya dapat mengganggu perencanaan dan penganggaran (Rondonuwu et al., 2021). Data yang tidak valid akan menciptakan masalah dalam pengambilan keputusan, sehingga mengurangi efisiensi dan penggunaan anggaran dan potensi keberhasilan program-program pembangunan.

Dari segi efektivitas, SIPD diharapkan dapat memperbaiki keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan pembangunan. Namun, untuk mencapai tujuan ini, DPMD perlu memastikan bahwa semua pengguna sistem memahami cara mengoperasikan SIPD dengan baik. Pelatihan yang terus-menerus, serta umpan balik yang konstruktif dari pengguna, sangat penting untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dengan adanya SIPD, diharapkan pengambilan keputusan tidak lagi mengandalkan asumsi atau pengalaman masa lalu, tetapi berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem ini memungkinkan pemantauan real-time terhadap pelaksanaan program, sehingga keputusan dapat diambil dengan lebih responsif terhadap perubahan kondisi di lapangan.

SIPD juga mendukung transparansi, sehingga masyarakat dapat melihat proses pengambilan keputusan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Keterbatasan pengetahuan teknis dan kurangnya pelatihan yang memadai memperburuk situasi ini berdasarkan keadanya dilapangan menunjukkan bahwa sistem aplikasi SIPD ini masih sulit diakses, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pengumpulan dan pengolahan data (Warjiyono et al., 2021). Ketidakakuratan data yang diinput dapat mengakibatkan laporan keuangan yang tidak valid, yang pada gilirannya mempengaruhi pengambilan keputusan dan perencanaan anggaran. Kesalahan ini sering kali berasal dari kurangnya pemahaman tentang cara menggunakan fitur-fitur SIPD dengan efektif, serta ketidakselarasan antara data yang diinput dan kebijakan yang ada.

Meskipun, penerapan SIPD dalam manajemen keuangan daerah tidak lepas dari tantangan. Penelitian sebelumnya oleh Muhammad Irfan Nasution dan Nurwani (2021) menegaskan bahwa Pada awal tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengadopsi versi terbaru dari aplikasi SIPD. staf diharapkan dapat memahami dan mengoperasikan SIPD dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan akurasi data dan efektivitas pelaporan. Investasi dalam pengembangan kompetensi ini tidak hanya akan mengatasi masalah operasional, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pengelolaan. Regulasi yang relevan mengenai pelatihan aplikasi SIPD di DPMD berfokus pada peningkatan kompetensi staf untuk memahami dan mengoperasikan sistem dengan lebih baik. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019: Peraturan ini menggantikan Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 dan bertujuan untuk mengintegrasikan informasi pemerintahan daerah dalam satu sistem yang terhubung (Wahyuningsih, 2022). Ini mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data daerah.

Implementasi yang sukses sangat bergantung pada kemampuan pengguna dalam memahami dan mengoperasikan sistem ini (Apniwansyah et al., 2022). Salah satu masalah yang dihadapi DPMD Kabupaten Cirebon adalah

kurangnya sosialisasi secara offline atau langsung, yang menyebabkan sebagian besar staf tidak sepenuhnya memahami fungsi dan manfaat SIPD. SIPD berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta mempermudah proses penginputan data penyusunan laporan keuangan yang lebih tepat dan cermat. Dengan demikian, implementasi SIPD tidak hanya bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi administratif, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan (Wahyuningsih, 2022).

Di DPMD Kabupaten Cirebon, telah dilaksanakan 2 sesi pelatihan daring implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tahun 2024. Peserta pelatihan mencakup 70% staf yang terlibat dalam pengelolaan dana desa, dengan masing-masing sesi berlangsung sekitar 20 jam. Setelah dievaluasi, efektivitas pelatihan tersebut dinilai kurang optimal. Hasil menunjukkan bahwa 45% peserta masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan SIPD dan sekitar 40% laporan keuangan desa mengalami revisi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelatihan daring telah dilakukan, pemahaman dan penerapan pengetahuan oleh staf masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, penting dilakukan perbaikan dalam metode pelatihan dan pengembangan program berkelanjutan agar staf dapat lebih efektif dalam mengelola SIPD.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan alat yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan serta pengelolaan pembangunan di tingkat daerah (Ratu et al., 2022). Di Kabupaten Cirebon, keberadaan SIPD diharapkan dapat Mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efektif, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran (Faizah & Sari, 2022). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sosialisasi SIPD kepada pengguna, khususnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), masih sangat minim, kurangnya pelatihan yang memadai menyebabkan pengguna tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya upaya sosialisasi langsung dari pihak pusat mengenai penggunaan SIPD, Dampak dari kurangnya sosialisasi ini sangat signifikan. Proses input data

menjadi tidak akurat, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas laporan dan perencanaan pembangunan.

Selain itu, ketidakpahaman terhadap sistem menyebabkan rendahnya partisipasi pengguna dalam penginputan data dan pengelolaan informasi, sehingga tujuan utama SIPD untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sulit tercapai. Terlebih lagi, jika penggunaan SIPD dilakukan secara daring, maka dianggap kurang efisien bagi para pengguna di DPMD Kabupaten Cirebon. Dengan demikian, pemerintah daerah harus melakukan tindakan-tindakan tertentu. konkret untuk meningkatkan penggunaan SIPD (Warjiyono et al., 2021), seperti memperkuat sosialisasi di DPMD Kabupaten Cirebon. Upaya untuk meningkatkan pemahaman pengguna tentang SIPD melalui pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif dapat membantu meningkatkan keterlibatan pegawai, memperbaiki kualitas data, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Peningkatan sosialisasi ini tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi DPMD, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon, yang bergantung pada kualitas dan akuntabilitas pembangunan yang dilakukan (Warjiyono et al., 2021). Alasan yang mendasari penulis memilih judul ini karena selama pengamatan dalam menemukan studi kasus, penerapan SIPD sebagai aplikasi pengelolaan keuangan daerah di DPMD Kabupaten Cirebon menjadi titik permasalahan yang cukup serius dan selalu menjadi topik pembahasan di instansi tersebut. Mengingat bahwa aplikasi SIPD ini merupakan aplikasi yang sistemnya masih baru, belum sempurna, dan masih terdapat kekurangan dalam berbagai aspek, penelitian ini tidak hanya relevan untuk Kabupaten Cirebon, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih luas mengenai implementasi sistem informasi di tingkat daerah.

Pengelolaan keuangan yang efisien, sangat penting untuk kemajuan daerah. Perbandingan dengan daerah lain, seperti Kabupaten Sleman, Yogyakarta, menunjukkan bahwa pendekatan yang berbeda dapat memberikan hasil yang lebih baik. Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, misalnya, DPMD berhasil menerapkan program pelatihan berbasis komunitas yang melibatkan

masyarakat dalam setiap tahap pengembangan. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pelatihan, SDM di DPMD dapat lebih memahami kebutuhan spesifik masyarakat, yang meningkatkan efektivitas program pemberdayaan dan pengelolaan dana desa. Pendekatan ini telah berhasil menciptakan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, menghasilkan outcome yang positif dalam penggunaan anggaran dan pengembangan program (Aset et al., 2023).

Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki aplikasi SIPD, serta mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan, demi tercapainya pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon)."

B. Identifikasi Masalah

1. Kualitas laporan keuangan yang baik bergantung pada kompetensi Sumber daya manusia, yang mencakup pengetahuan, kemampuan, dan karakteristik individu yang berkontribusi pada pencapaian tujuan, sangat penting. Kemudahan penyusunan laporan keuangan dapat dicapai melalui keberadaan kompetensi yang memadai, terutama dalam bidang akuntansi. Namun, kondisi aktual di lapangan terlihat bahwa kompetensi para pengelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah (DPMD) di Kabupaten Cirebon, terutama dalam akuntansi, masih kurang memadai. Hal ini mengakibatkan rendahnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan Untuk mengatasi hal ini, Pelatihan penyusunan laporan keuangan diadakan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas.
2. Kesalahan input data oleh pengguna atau kesalahan dalam proses pengelolaan data oleh sistem dapat menghasilkan informasi yang tidak akurat dalam laporan keuangan yang ada di DPMD. Ini disebabkan oleh

kurangnya pelatihan pengguna, kurangnya validasi data yang memadai, atau kegagalan sistem dalam mendeteksi dan memperbaiki kesalahan.

3. Sistem informasi sering mengalami masalah teknis terkait implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD). Meskipun aplikasi ini dirancang agar meningkatkan keterbukaan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, kurangnya sosialisasi mengenai penggunaannya menjadi penghalang utama. Belum adanya sosialisasi secara offline yang memadai mengakibatkan banyak pegawai dan pemangku kepentingan yang tidak memahami cara kerja dan manfaat dari aplikasi SIPD. Hal ini menyebabkan beberapa masalah teknis karna banyak yang mengakses ketika jam kerja mengakibatkan sistem menjadi eror.
4. Tanpa pemahaman yang jelas tentang penggunaan aplikasi, banyak pengguna merasa kesulitan dalam mengoperasikan sistem, yang pada gilirannya mengganggu operasional harian. Kegagalan sistem ini diakibatkan karena kurangnya sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi SIPD, hingga saat ini, implementasinya masih terhambat oleh beberapa kendala yang mengganggu operasionalnya karna sosialisasinya hanya melalui daring.

C. Pembatasan Masalah

Permasalahan yang diteliti merupakan permasalahan yang sangat luas, untuk menghindari terlalu luasnya permasalahan yang diteliti maka peneliti membatasi fokus masalah yakni Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon).

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kompetensi SDM di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan keuangan daerah?
2. Bagaimana implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah DPMD Kabupaten Cirebon?
3. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi SIPD di DPMD Kabupaten Cirebon?

4. Apa kendala utama yang dihadapi dalam implementasi SIPD di DPMD Kabupaten Cirebon dan bagaimana upaya mengatasi kendala tersebut?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tingkat kompetensi SDM di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan keuangan daerah
- b. Untuk mengetahui implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah DPMD Kabupaten Cirebon
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi SIPD di DPMD Kabupaten Cirebon
- d. Untuk mengetahui kendala utama yang dihadapi dalam implementasi SIPD di DPMD Kabupaten Cirebon dan bagaimana upaya mengatasi kendala tersebut

2. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya memiliki beberapa manfaat, yaitu:

- a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam dan informasi, pengetahuan untuk mahasiswa tentang bagaimana Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diharapkan dapat menambah sumber kepustakaan dibidang ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, di harapkan studi ini dapat dijadikan sebagai informasi yang bisa di manfaatkan dan media rujukan baik dalam keperluan akademis maupun non akademis.

b. Bagi Peneliti dan Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengalaman yang bermanfaat bagi peneliti dan pembaca, sehingga mereka dapat lebih memahami mendalam isu-isu yang diteliti dalam kehidupan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Implementasi SIPD Dalam Pengelolaan Keuangan daerah Studi Kasus DPMD Kabupaten Cirebon.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam tinjauan pustaka, peneliti memulai dengan menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh referensi yang mendukung, melengkapi, serta membandingkan temuan yang ada, sehingga kualitas penulisan skripsi ini menjadi lebih baik. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memperkuat kajian pustaka dengan penelitian-penelitian terkait. Selain itu, karena pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang mengapresiasi perbedaan serta perspektif yang beragam tentang subjek tertentu, maka perbedaan maupun persamaan yang muncul adalah hal yang wajar dan saling melengkapi (Wahyuningsih, 2022). Adapun ringkasan penelitian-penelitian relevan yang dijadikan sumber referensi terkait kajian dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Riedel Arthur Rondonuwu, Tinneke	Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi	Penelitian ini menggunakan pendekatan yang sama, yaitu metode	Dalam penelitian ini, judul yang diambil

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Evie Meggy Sumual, Cecilia Lely Kewo (2020)	(Siskeudes) dalam pengelolaan dana desa di Desa Kayuwi, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa		Siskeudes dalam manajemen dana desa di Desa Kayuwi memberikan dampak positif. Sebelum implementasi aplikasi, pengelolaan dana desa dilakukan secara manual dengan potensi kesalahan pencatatan.	kualitatif, untuk menggali informasi secara mendalam.	adalah aplikasi Siskeudes sedangkan penulis menggunakan aplikasi SIPD.
2.	Kahfi Lubis, Iqlima Azhar (2020)	Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SIPD di Bappelitbangda menghadapi kendala jaringan yang sering terganggu, kurangnya pengetahuan dalam menjalankan program baru, dan kebutuhan akan perda yang mengatur sistem tersebut. Meskipun sumber daya	Penelitian ini menggunakan Aplikasi yang sama yaitu SIPD pendekatannya sama, yaitu metode kualitatif, untuk menggali informasi secara mendalam.	Pada penelitian ini, Fokus pada implementasi kebijakan SIPD di Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Sitaro. Kendala jaringan, kurangnya pengetahuan dalam menjalankan program baru, yang mengatur sistem SIPD

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				manusia dan fasilitas sudah cukup, tetapi pentingnya komunikasi yang efektif dan pemahaman yang mendalam dalam penerapan kebijakan SIPD.		sedangkan dalam isi penelitian penulis bagaimana pengelolaan laporan keuangan daerah di DPMD dan Analisis kompetensi SDM dan implementasinya, pengelolaan keuangan daerah.
3.	Afrilia Bella Karundel Johanni E. Kaawoan, Sofia. Pangemanan (2020)	Implementasi kebijakan penelitian dan pengembangan daerah kabupaten kepulauan siau tagulandan biargo	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan kurangnya pengetahuan dalam menjalankan program baru, dan kebutuhan akan pemda yang mengatur sistem tersebut. Meskipun sdm sudah cukup dan fasilitas sudah cukup, tetapi pentingnya kompetensi yang efektif dan pemahaman yang mendalam	Penelitian ini sama sama menggunakan metode kualitatif dan membahas mengenai implementasi aplikasi.	Jenis aplikasi yang digunakan berbeda, tempat penelitian yang digunakan juga berbeda.

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				dalam penerapan kebijakan sipd		
4.	Frans Dione, Utami Faradina (2020)	Implementasi sistem informasi pembangunan daerah (sipd) dalam meningkatkan koordinasi pembangunan di daerah (studi tentang penerapan sipd pada bappedakot a bengkulu).	Kualitatif	Sumber daya yang ada dalam mendukung implementasi kebijakan sipd jumlah kemampuan staf serta dukungan fasilitas yang tersedia masih belum memadai.	Penelitian ini menggunakan Aplikasi yang sama yaitu SIPD pendekatan nya sama, yaitu metode kualitatif, untuk menggali informasi secara mendalam.	Penelitian ini dilakukan di daerah yang berbeda dengsn penelitian penulis.
5.	Putriasri Pujanira, Abdullah Taman (2021)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Kuantitatif	Hasil Penelitian ini mengindikasikan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia serta penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki dampak positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY.	Menggunakan aplikasi yang sama yaitu SIPD.	Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan penelitian ini dilakukan di daerah yang berbeda dengan, penelitian penulis, penulis menggunakan metode kualitatif

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Pemerintah Daerah Provinsi Diy				
6.	Alqi Faizah, Retnosari (2022)	Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun	Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa di Banyudono efektif dan sesuai prosedur, dengan SDM pengguna Siskeudes yang cukup siap meski berpendidikan SMA.	Metode yang digunakan sama yaitu metode kualitatif.	Dalam penelitian ini, judul yang diambil adalah aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa sedangkan dalam judul penulis menggunakan judul Kompetensi SDM Dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
						Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD)
7.	Gozi Apniwan syah, Putu Widiantara, Mega Trishutana Pathiassana (2022)	Upaya Mengoptimalkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat penyesuaian dalam bentuk Aplikasi smartphone yang tersedia digunakan untuk pemantauan. Implementasi SIPD memberikan dampak positif bagi perencanaan pembangunan daerah, terlihat dari peningkatan faktor-faktor yang mendukung pembangunan tersebut. Upaya telah dilakukan untuk mengoptimalkan SIPD di Kabupaten Sumbawa, yang tercermin dalam	Penelitian ini menggunakan Aplikasi yang sama yaitu aplikasi SIPD, metode yang digunakan sama yaitu metode kualitatif.	Dalam penelitian ini berfokus pada Upaya Mengoptimalkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah saja tidak ada studi kasus penelitiannya sedangkan dalam penelitian penulis dengan judul Analisis Kompetensi Sdm Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dalam Pengelolaan Keuangan

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				perencanaan sosialisasi dan penyesuaian SIPD yang telah dilakukan.		Daerah Di (Dpmd)
8.	Catrina Ratu Tunggal Agung, Lala M Kolopaki ng, Harianto (2022)	Strategi Pemerintah Kota Bogor dalam Penerapan SIPD	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan kerangka data SIPD di Pemerintah Kota Bogor tidak layak. Untuk perbaikan, dibutuhkan kemudahan penggunaan dan infrastruktur yang memadai.	Penelitian ini menggunakan Aplikasi yang sama yaitu aplikasi SIPD, metode yang digunakan sama yaitu metode kualitatif.	Penelitian ini dilakukan di berbeda dengan Penelitian, dalam penelitian ini hanya penerapan SIPD saja sedangkan penelitian penulis, lebih spesifik mengenai SIPD
9.	Devia Yulianda, nasrul kahfi lubis, iqlima azhar.	Pengaruh kompetensi penggunaan teknologi, informasi dan Implementasi sipd terhadap kualitas laporan teknologi informasi dan	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan dari uji koefisien diketahui bahwa kompetensi pengguna teknologi informasi, dan penerapan sipd memengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Langsa sebesar	Penelitian ini menggunakan Aplikasi yang sama SIPD,	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan penelitian yang berbeda dengan penelitian penulis, penulis menggunakan

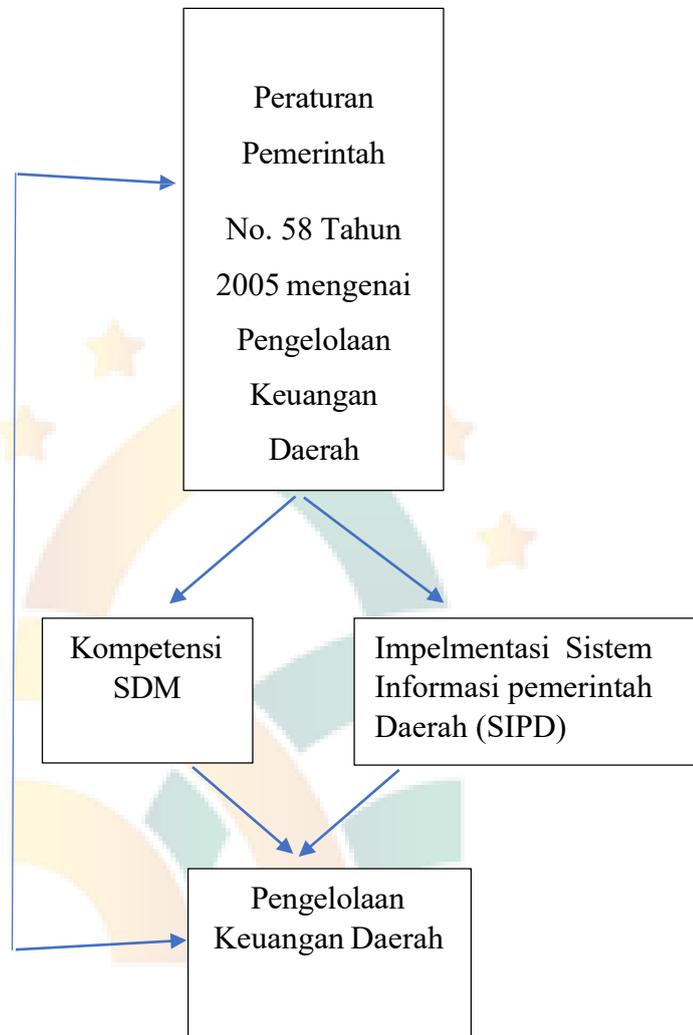
No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		implementasi sipd terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota langsa.		51,7%, sedangkan 48,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainyang tidak termasuk dalam model penelitian ini.		an metode kualitatif.
10.	Rizal Nur Arif1), Amrie Firmansyah (2024)	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Ri (Sipd Ri) Dalam Proses Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganya	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan BKD Kabupaten Karanganyar telah mempersiapkan diri untuk menerapkan kebijakan penggunaan aplikasi SIPD RI Karena sebagian besar aspek telat dipengaruhi dengan baik, meliputi standar dan sasaran kebijakan sumber daya, komunikasi antar organisasi, serta sikap dan disposisi para pelaksana.	Penelitian ini menggunakan Aplikasi yang sama yaitu SIPD pendekatan nya sama, yaitu metode kualitatif, untuk menggali informasi secara mendalam.	Dalam penelitian ini judul yang di ambil Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Ri (Sipd Ri) Dalam Proses Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah sedangkan dalam penelitian penulis Analisis Kompetensi SDM Dan Implementasi Sistem Informasi

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
						Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di DPMD.

G. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2013), kerangka pemikiran merupakan alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju. Jadi kerangka berpikir merupakan alur yang dijadikan pola berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap suatu objek yang dapat menyelesaikan arah rumusan masalah dan tujuan penelitian (Hermawan Iwan, 2019). Berdasarkan pelayanan publik dan pengembangannya, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola keuangan daerah. Pengelolaan ini memerlukan kompetensi SDM, yang tercermin dalam laporan keuangan daerah (Nirmala et al., 2023). Laporan keuangan tersebut harus memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri (Rumondor et al., 2023). Regulasi ini mencakup pengelolaan keuangan daerah, termasuk otoritas pengelolaan dan sistem informasi akuntansi daerah, mulai dari penyusunan, penetapan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Dengan melakukan analisis kompetensi sumber daya manusia dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan di DPMD Kabupaten Cirebon, sebagai sistem informasi akuntansi daerah, diharapkan dapat mempertanggungjawaban Keuangan Daerah sesuai dengan kewajibannya. Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian sebelumnya, peneliti mengembangkan kerangka pemikiran yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan ucapan, tulisan, perilaku, dan fenomena dalam konteks tertentu dengan perspektif yang komprehensif (Jaya, 2020). Data kualitatif dapat dikumpulkan melalui Dalam penelitian ini, data kualitatif yang dikumpulkan meliputi wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, dan observasi dari DPMD Kabupaten Cirebon meliputi sejarah, struktur organisasi, dan beberapa data pendukung lainnya. Ada dua alasan mengapa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Pertama, masalah yang diteliti memerlukan data Informasi yang diperoleh dari lapangan bersifat terkini dan relevan dengan konteks. Kedua, pendekatan ini dipilih karena sangat relevan dengan masalah yang sedang diteliti dan tidak dapat dipisahkan dari fakta-fakta yang ada

Tempat penelitian ini dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon yang beralamat di Jl. Sunan Muria Kec. Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendetail mengenai Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah (studi kasus di DPMD Kabupaten Cirebon). Dalam hal ini, peneliti berfungsi sebagai pengamat yang menganalisis serta mempertimbangkan berbagai faktor yang saling berinteraksi. dalam konteks penelitian tersebut.

Pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di DPMD Kabupaten Cirebon. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus pada proses, makna, dan pengalaman subjek dalam konteks nyata. (Nurdin & Hartati, 2019).

3. Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

a. Data Primer

Untuk data primer, penulis mengumpulkan informasi secara langsung dari lokasi atau objek yang diteliti, termasuk melakukan wawancara (Tampubolon, 2023). tatap muka dengan 3 pegawai di DPMD. dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, yaitu Pak M Yusuf SKM sebagai kepala subbagian

umum dan keuangan, Pak Asep Supriyatna SE sebagai Kepala subbagian umum dan kepegawaian, Lies Yuliasmurni, S.Sos, M. Si. Sebagai penggerak swadaya masyarakat dan sumber daya manusia. Peneliti juga melakukan observasi di kantor DPMD untuk mendokumentasikan dan mencatat kondisi Data ini dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian sebelumnya yang mencakup literatur seperti buku, jurnal, tesis, dan artikel. Data ini membantu peneliti memahami konsep yang relevan dan membandingkan penelitian yang ada dengan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di Kabupaten Cirebon.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial dari objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka untuk menjawab pertanyaan penelitian yang relevan (Cirebon, 2022). Berikut adalah alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Ponsel
- b. Buku catatan
- c. Perlengkapan menulis
- d. Kumpulan pertanyaan untuk wawancara
- e. Alat Perekam Suara

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tentang analisis dampak kompetensi sumber daya manusia dan penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersifat semi terstruktur. Dalam hal ini, pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber, namun pelaksanaan pertanyaannya tetap fleksibel dan disesuaikan dengan jalannya diskusi (Fadhallah, 2021). Metode wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai Analisis Kompetensi SDM dan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah studi kasus di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon. Adapun informannya yaitu 1) pak M Yusuf SKM bagian kepala subbagian program dan keuangan 2) pa Handi Darmawan, S.A.P bagian penggerak swadaya masyarakat ahli pertama, 3) pa Usu Totong suhartono sebagai pengelola keuangan.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung fenomena atau peristiwa yang sedang diteliti (Kurniawan, 2021). Dalam hal ini, penulis mengunjungi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon untuk melakukan penelitian dan pengamatan langsung di lapangan guna mendapatkan data yang lebih nyata.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data lainnya dalam penelitian kualitatif adalah dokumentasi. Dokumentasi berfungsi untuk melengkapi informasi yang diperlukan dan untuk memahami berbagai aspek terkait dengan masalah yang diteliti (Cirebon, 2022), seperti pengumpulan data dari buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, buletin, makalah, dan sumber-sumber lain.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017), analisis data merupakan proses sistematis untuk mencari dan mengorganisir data yang biasanya diperoleh

dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya, sehingga menjadi lebih mudah dipahami dan dapat disampaikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang diterapkan oleh peneliti dalam studi ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi Analisa Kompetensi Sumber Daya Manusia dan implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD). Dalam pendekatan kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber secara berkesinambungan menggunakan beragam teknik pengumpulan data. mengemukakan bahwa analisis dimulai dengan merumuskan dan menjelaskan suatu masalah, yang kemudian diikuti oleh penelitian lapangan hingga penulisan laporan akhir. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga kegiatan yang berlangsung secara bersamaan, yang menunjukkan bahwa analisis data kualitatif adalah sebuah upaya yang terus-menerus, berulang, dan berkelanjutan (Aset et al., 2023). Sarosa (2021) menjelaskan bahwa tahapan analisis data kualitatif setelah pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- Reduksi Data, adalah proses seleksi, fokus, penyederhanaan, ringkasan, dan transformasi data mentah.
- Penyajian Data, adalah proses menampilkan data yang telah disederhanakan dalam bentuk yang memudahkan penarikan kesimpulan.
- Verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah langkah di mana hasil penelitian disimpulkan sambil memastikan bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, langkah-langkah dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

- a. Penulis mengumpulkan data menggunakan instrumen yang telah ditentukan, lalu mengorganisir semua data yang terkumpul.

- b. Penulis meninjau kembali keseluruhan data dan mencatat informasi penting.
- c. Penulis mengidentifikasi dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan responden dengan cara menghilangkan pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan.
- d. Mereduksi data dengan memilah, memusatkan, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari catatan di lapangan
- e. Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi dalam bentuk naratif, selektif, dan komunikatif.
- f. Perumusan kesimpulan dilakukan dengan meninjau kembali data di lapangan untuk memastikan kebenaran dan validitas makna yang diperoleh. Hasil tersebut kemudian diinterpretasikan dan disajikan dalam bentuk naratif.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan lebih terstruktur dengan adanya sistematika yang jelas. Adapun sistematika penulisan terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup Pendahuluan ini akan menjelaskan latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini, diikuti dengan perumusan masalah yang ingin dipecahkan. Selanjutnya, akan diuraikan tujuan dan manfaat dari penelitian ini, serta tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Metodologi penelitian yang digunakan juga akan dipaparkan, dan terakhir, sistematika penulisan akan dijelaskan untuk memberikan gambaran mengenai struktur laporan penelitian ini.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori yang menjadi dasar analisis masalah dalam penelitian ini serta menggambarkan pemikiran peneliti untuk menyusun Bab IV tentang hasil dan pembahasan. Termasuk juga kerangka pemikiran.

3. BAB III GAMBARAN

Bab ini menjelaskan gambaran objek penelitian, mencakup selang pandang DPMD Kabupaten Cirebon, tugas dan fungsi DPMD, serta sumber daya manusia dan struktur organisasi DPMD Kabupaten Cirebon.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti serta mendiskusikannya dengan merujuk pada data yang relevan, terkait dengan analisis kompetensi SDM dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah studi kasus di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon.

5. BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan tersebut disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, disampaikan secara singkat dan jelas. Saran ditujukan sebagai bahan evaluasi bagi peneliti atau pembaca mengenai penelitian tentang analisis kompetensi SDM dan implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah studi kasus di DPMD Kabupaten Cirebon.